

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adnyani, Ni Ketut sari. *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=5nkvEAAAQBAJ>.
- Agussalim Andi, Gadjong. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Edited by Sikumbang Risman. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Anis Ibrahim. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Edisi Pertama*. Malang: Setara Press, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Dayanto, and Karim Asma. *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teori, Metoda, Dan Teknik Pembentukan*. Revisi. Malang: Setara Pers, 2019.
- Fendri, Azmi. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
https://www.google.co.id/books/edition/Pengaturan_Kewenangan_Pemerintah_Dan_Pem/sGffEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan Dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Jalil, Husni, La Ode Husen, Andi Abidin, and Farah Syah Reza. *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: P.t. Alumni, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Nugroho, Sigit Supto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Edited by Sarjiyati. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Vol. 2. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Rahim, Ibnu Fajar, A Rahim, and Januhari Guwi. *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
https://www.google.co.id/books/edition/Kewenangan_Kejaksaan_Mewakili_Pemerintah/-N50EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.

Ridwan. *Hukum Administrasi Di Daerah*. Edited by Ni'matul Huda. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, and Catur Wido Haruni. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2016.

Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2018.

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. Undang-Undang

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

_____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

_____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

_____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada

_____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

_____. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

_____. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak

_____. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

C. Jurnal/Website

Citra Rosa, Maya. "Alasan Wagub Agam Mundur Dari Jabatannya, Irwan Fikri : Hubungan Kerja Dengan Bupati Tidak Cocok." Kompas.com, 2023.

<https://regional.kompas.com/read/2023/05/19/135313178/alasan-wabup-agam-mundur-dari-jabatannya-irwan-fikri-hubungan-kerja-dengan?page=all>.

- Danesa Wijaya, Adam Bintang. “Penyelesaian Sengketa Pilkada Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Dalam Pasal 24 C Ayat (1) & (2) UUD 1945.” *Jurnal Unmuhjember* 20, no. 20 (2023): 17.
- Evando, Yulisa. “Kinerja Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” Universitas Lampung, 2022.
- Gramsci. K, Muh. “Problematisasi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Kendari.” Universitas Islam Indonesia, 2020. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Hadita, Cynthia, Mirza Nasution, Afrila, and Abd Harris. “Implikasi Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah.” *Buletin Konstitusi* 2, no. 1 (2021): 86–99.
- Noviati, Cora Elly. “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 333–54. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1027/106>.
- Pardede, Marulak. “Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 127–48.
- Pratama, Seta Ubara Yusa, and Aribowo. “Relasi PKB Dan PDIP Pasca Konflik Antara Bupati Dan Wakil Bupati Bojonegoro.” *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 9, no. 1 (2023): 25–32. <https://doi.org/10.20473/jpi.v9i1.45145>.
- Rahmah, Uul Fathur. “Kewenangan Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas.” *Lex Economica Journal* 1, no. 1 (2023): 55–67. <https://lexeconomicajournal.uinkhas.ac.id/index.php/lexcon/article/download/2/7/25>.
- Ratih Damayanti, Gusti Ayu, and Suryantok. “Implementasi Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten Lombok Barat).” *UnizarLawReview* 2, no. 2 (2019): 98–108. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/161/142>.
- Ripaldi, Riyan, and Ridham Priskap. “Analisis Yuridis Kewenangan Sekretaris Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 178–97.

- Risal, and La Ode Munawir. "Pembagian Kewenangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Legal Standing* 5, no. 2 (2021): 71–80.
- Solihat, Yeyet, and Nanang Nugraha. "Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang)." *Jurnal Politikom Indonesiana* 1, no. 2 (2016): 131–50.
- Suharizal. "Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2016): 93–112.
- Taufiqurrahman, MHD. "Efektifitas Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 1 (2022): 910–22.
- Thurmudzi, Muhammad Anas, and Krisnadi Nasution. "Penggunaan Online Dispute Resolution Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2022): 38. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i1.1754>.
- Yanti, Yuni, and Bahder Johan Nasution. "Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang." *Limbago* 1, no. 2 (2021): 325–45.
- Rachmawati. "Konflik Bupati Dan Wabup Bojonegoro Gara-Gara 'Chat' Grup WhatsApp, Kini Kasusnya Dihentikan Polisi." Kompas.com, 2021. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/02/03/181800178/konflik-bupati-dan-wabup-bojonegoro-gara-gara-chat-grup-whatsapp-kini?page=all>. diakses pada 24 April 2024 pukul 11.29 WIB.
- Ramda, Eduardo Edwin. "Rethinking Jabatan Wakil Kepala Daerah." Balipost Portal Berita, 2023. <https://www.balipost.com/news/2023/07/04/348214/Rethinking-Jabatan-Wakil-Kepala-Daerah.html>. diakses pada 24 April 2024 pukul 11.27 WIB.
- Hamapu, Alamudin. "Hubungan Retak, Gubernur Kepri Sebut Wagub Tak Pernah Ngantor Setahun Lebih." detikSumut, 2022. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6402043/hubungan-retak-gubernur-kepri-sebut-wagub-tak-pernah-ngantor-setahun-lebih>. diakses pada 3 Mei 2024 pukul 11.21 WIB.
- Zainudin, M. "Kepala Daerah Tak Perlu Wakil Kepala Daerah." KataKata.Id, 2022. <https://katakata.id/opini/kepala-daerah-tak-perlu-wakil-kepala-daerah/>. diakses pada 7 Mei 2024 pukul 10.30 WIB.